



Analisis Rasio Keuangan Berbasis SAP terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2021-2024)

**Fathul Hilal Perdana Kusuma.S.E.,M.M^{1*}, Nina Yulianasari.S.E.,M.Sc²,
Imellia Chelomitha³, Alkerina Sindi Delvia⁴, Vira Naila Fenita⁵, Putri Herlianti⁶
Meisyah Rahel Gracella⁷, Resty Made Pertiwi⁸, Aris Dwi Saputra⁹
Dona Oktaviani¹⁰**

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

Email: fathul.hilal.5758@gmail.com¹, ninayulianasari@gmail.com², imelliachelomitha@gmail.com³,
sindydelvia34@gmail.com⁴, viranaila9@gmail.com⁵, putriherlianti20@gmail.com⁶, meisyahrahel@gmail.com⁷,
restiipratiwii03@gmail.com⁸, saputra_aris@icloud.com⁹, donaoktaviani881@gmail.com¹⁰

*Penulis Korespondensi: fathul.hilal.5758@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation of financial ratio analysis based on Government Accounting Standards (SAP) in relation to the financial performance and accountability of the Bengkulu City Government for 2021–2024. Financial ratio analysis is an important instrument in measuring the effectiveness, efficiency, independence, and accountability of regional financial management. The study adopted a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Bengkulu City Regional Financial Report (LKPD). The analytical methods applied included the regional financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and activity ratio. The findings of this study indicate that the financial performance of the Bengkulu City Government generally improved during the observation period. The effectiveness ratio indicates an increase in the realization of regional original revenue, while the efficiency ratio reflects improved expenditure management. However, the level of regional financial independence remains relatively low, with regional revenues still dependent on central government transfers. From an accountability perspective, the implementation of SAP contributes significantly to the quality of transparency and accountability in regional financial reports. This study implies that optimization of regional original revenue and improvement of budget management are necessary to support sustainable regional financial performance and accountability.*

Keywords : *accountability; financial performance; local government; regional finance; SAP.*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan analisis rasio keuangan yang berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam kaitannya dengan kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun 2021–2024. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengambil pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder yang didapat LKPD Kota Bengkulu. Metode analisis yang diterapkan mencakup rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu secara umum mengalami peningkatan selama periode pengamatan. Rasio efektivitas menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah, sedangkan rasio efisiensi mencerminkan pengelolaan belanja yang semakin baik. Namun, tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dimana pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dari sisi akuntabilitas, penerapan SAP memberikan kontribusi yang baik untuk kualitas transparansi dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah dan peningkatan pengelolaan anggaran perlu terus dilakukan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: akuntabilitas; keuangan daerah; kinerja keuangan; pemerintah daerah; SAP.

1. LATAR BELAKANG

Pengelola keuangan di tingkat daerah adalah salah satu elemen penting terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah diharuskan mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan SAP (Kementerian

Keuangan Republik Indonesia, 2022). Penerapan SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui penganalisisan rasio keuangan yang menunjukkan sejauh mana tingkat efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan aktivitas pengelolaan keuangan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Penganalisisan rasio keuangan memberikan gambaran mengenai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Semakin tinggi rasio keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah Kota Bengkulu yang merupakan salah satu entitas pemerintah daerah di Indonesia terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, masih ada berbagai tantangan seperti ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari serta belum maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini menuntut adanya evaluasi terhadap kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah lewat analisis rasio keuangan yang berbasis SAP.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SAP dan analisis rasio keuangan berdampak positif terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan daerah. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji Pemerintah Kota Bengkulu periode 2021–2024 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan berbasis SAP terhadap kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.

Sasaran penelitian ini untuk mengukur sejauh mana tingkat kerja keuangan dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan analisis rasio keuangan berbasis SAP tahun 2021–2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP merupakan sekumpulan prinsip Akuntansi yang dipakai untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu laporan keuangan sehingga menjadi relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami.

Penerapan SAP yang berbasis aktual membawa perubahan signifikan dalam sistem pelaporan keuangan untuk pemerintah daerah. Basis aktual memungkinkan pengakuan atas pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih menyeluruh dibandingkan dengan basis kas. Dengan demikian, pemerintah daerah mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan sebuah daerah mencerminkan seberapa sukses pemerintah daerah dalam mengelola aset keuangannya dengan cara yang efektif, efisien, ekonomis, dan transparan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Kinerja keuangan dapat dinilai melalui berbagai indikator seperti rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan aktivitas.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting hal ini dikarenakan dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kinerja keuangan suatu daerah, akan semakin baik pula kapasitas daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah secara mandiri.

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah adalah bentuk tanggung jawab dalam menjelaskan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pihak yang terkait. Akuntabilitas diwujudkan dalam pembuatan laporan keuangan yang transparan dan dengan menggunakan ketentuan dari SAP.

Penerapan akuntabilitas yang efektif dapat menaikkan kualitas tata kelola pemerintah, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Rasio Keuangan Daerah

Adapun beberapa keuangan daerah yang umum digunakan yaitu :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mengidentifikasi kemampuan daerah guna membiayai kegiatan pemerintahan menggunakan PAD tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Semakin baik rasio kemandirian, maka akan semakin mandiri suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas

Mengukur tingkat pencapaian pemerintah daerah terhadap keberhasilan mencapai target PAD

Rasio Efisiensi

Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menekan biaya untuk memperoleh pendapatan. Semakin kecil rasio efisiensi, pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.

Rasio Aktivitas

Mengukur proporsi alokasi belanja operasional dan investasi dalam APBD. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengutamakan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Hubungan SAP dengan kinerja dan akuntabilitas

Penerapan SAP memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah. SAP mempermudah pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan secara sistematis, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah proses pengauditan, meningkatkan transparansi pengelolaan APBD, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis rasio keuangan daerah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan memiliki peranan penting dalam mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, kemandirian, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Disisi lain, penerapan SAP juga terbukti mampu meningkatkan mutu laporan keuangan di tingkat daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2022) mengenai analisis rasio keuangan pada pemerintah daerah memperlihatkan bahwa rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tingginya tingkat efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Penelitian oleh Prasetyo (2023) mengenai dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas finansial daerah mengungkapkan bahwa penerapan SAP yang berfokus pada akrual dapat meningkatkan kualitas transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Studi menjelaskan sistem pencatatan berbasis akrual memberikan informasi yang lebih menyeluruh tentang keadaan keuangan daerah, sehingga mempermudah proses pengawasan serta audit keuangan.

Selanjutnya, penelitian oleh Yuliani (2021) mengenai efektivitas dan efisiensi keuangan daerah di pemerintah kota Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki tingkat efektivitas yang cukup memuaskan dalam mencapai target PAD, namun tetap menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian itu menyimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada dana dari pusat masih cukup

besar, sehingga kemampuan untuk membiayai pembangunan daerah secara mandiri belum mencapai tingkat yang optimal.

Penelitian oleh Mahmudi (2021) mengenai analisis laporan keuangan daerah menjelaskan bahwa penggunaan rasio keuangan adalah metode evaluasi yang krusial dalam sektor publik. Dengan memanfaatkan rasio-rasio ini, pemerintah daerah dapat memahami situasi keuangan daerah secara lebih objektif, mencakup kapasitas daerah dalam mendanai pembangunan, tingkat efektivitas penggunaan anggaran, serta prioritas dalam pengalokasian belanja daerah.

Dalam kajian Halim (2020) mengenai akuntansi keuangan daerah, diungkapkan bahwa tingkat kemandirian finansial daerah di Indonesia tergolong masih rendah. Banyak pemerintah daerah yang masih sangat tergantung pada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat. Hal ini membuat optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi tantangan utama dalam implementasi otonomi daerah.

Kasmir (2021) dalam penelitiannya mengenai analisis laporan keuangan menjelaskan bahwa rasio keuangan tidak hanya diterapkan di sektor swasta, tetapi juga sangat relevan untuk sektor publik. Melalui analisis rasio keuangan, dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan suatu entitas, termasuk di level pemerintah daerah.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Nordiawan (2020) mengenai akuntansi pemerintahan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual memiliki dampak positif terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan menggunakan basis akrual, pemerintah dapat mencatat seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dengan lebih detil sehingga laporan keuangan menjadi lebih tepat dan transparan.

Ritonga (2021) dalam penelitiannya tentang akuntansi daerah menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia di aparatur pemerintah. Kemampuan pegawai dalam memahami sistem akuntansi pemerintahan menjadi faktor penentu dalam kualitas penyusunan laporan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian Darise (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan pada tingkat daerah perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah daerah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini akan lebih mudah mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penelitian Haryanto (2020) tentang sektor publik mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi keuangan serta mempermudah proses pengawasan anggaran. Sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi juga membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat dan tepat.

Penelitian Wibowo (2021) menjelaskan bahwa manajemen kinerja di sektor publik sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya dengan efektif. Evaluasi kinerja melalui indikator keuangan menjadi salah satu metode untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Selanjutnya, penelitian Sujarweni (2021) menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan daerah dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan APBD. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik pada periode mendatang.

Penelitian Yusuf (2020) mengenai pengantar akuntansi pemerintahan mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki peran penting sebagai sarana pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan SAP agar kualitas informasi keuangan tetap terjaga.

Penelitian lain oleh Bastian (2019) yang membahas akuntansi sektor publik menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah sangat krusial dalam mendukung penerapan *good governance*. Pemerintah daerah harus dapat menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Penelitian oleh Widodo (2020) tentang tata kelola yang baik menyoroti bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam manajemen pemerintahan yang modern. Pemerintah daerah dengan tingkat transparansi yang tinggi biasanya mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat.

Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan serta penerapan SAP saling terkait erat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang keadaan finansial pemerintah daerah, sedangkan penerapan SAP berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara spesifik meneliti penerapan analisis rasio keuangan yang berbasis SAP terhadap kinerja serta akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bengkulu untuk periode 2021–2024. Penelitian ini juga berfokus pada evolusi

rasio keuangan daerah selama empat tahun terakhir, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan daerah pasca penerapan SAP berbasis akrual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan deskriptif kuantitatif. Data yang dipakai merupakan data skunder yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari pemerintah kota Bengkulu untuk periode 2021-2024.

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bengkulu, sedangkan sampel yang diteliti terdiri dari laporan realisasi anggaran serta neraca daerah untuk tahun 2021 sampai 2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi laporan keuangan daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.

Dalam menganalisis data, menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan daerah terdiri dari:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- b. Rasio Efektivitas PAD
- c. Rasio Efisien Keuangan
- d. Rasio Aktivitas

Analisis itu dilakukan dengan membandingkan hasil rasio keuangan selama rentang waktu penelitian guna menilai perkembangan kinerja serta akuntabilitas keuangan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil dari evaluasi didapati bahwa kemandirian finansial Pemerintah Kota Bengkulu tergolong masih rendah. Ini dapat dilihat dari proporsi dana transfer dari pemerintah pusat jika dibandingkan PAD. Walaupun begitu, terdapat pertumbuhan PAD pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber pendapatan lokal. Namun, kontribusi PAD terhadap jumlah pendapatan daerah masih terbilang rendah, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat tetap tinggi.

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi PAD Pemerintah Kota Bengkulu cenderung berjalan efektif karena berhasil mencapai target yang ditentukan. Peningkatan efektivitas tersebut dikarenakan oleh optimalisasi pajak daerah serta retribusi daerah.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan kondisi yang memuaskan. Pemerintah Kota Bengkulu berhasil mengelola pengeluaran daerah sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk belanja operasional ketimbang belanja modal. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih memerlukan peningkatan.

Pembahasan

Hasil riset mengindikasikan bahwa implementasi SAP memiliki dampak yang baik terhadap peningkatan nilai laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Laporan keuangan kini menjadi lebih transparan, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga mendukung terbentuknya akuntabilitas publik.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah mulai lebih baik dalam mengatur masalah keuangannya. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik yang menekankan perlunya keterbukaan, tanggung jawab, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik.

Namun, rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah tetap menjadi tantangan signifikan bagi Pemerintah Kota Bengkulu. Ketergantungan yang tinggi pada dana yang diterima dari pusat menunjukkan bahwa kapasitas daerah untuk mendanai pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Selain itu, proporsi anggaran daerah yang cenderung didominasi oleh pengeluaran operasional menekankan perlunya perubahan dalam proses penganggaran agar investasi dapat ditingkatkan. Pengeluaran yang tepat untuk investasi akan memberikan efek jangka panjang dalam pengembangan ekonomi daerah.

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis aktual juga berperan terhadap peningkatan kualitas pengawasan keuangan daerah, karena semua transaksi terdokumentasi dengan lebih detail dan lengkap. Hal ini dapat mempermudah proses audit dan membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran anggaran.

Dengan demikian, penerapan SAP bersama analisis rasio keuangan menjadi alat yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Didapat dari hasil studi, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kota Bengkulu untuk tahun 2021–2024 secara umum menunjukkan kemajuan yang cukup positif. Rasio efektivitas dan efisiensi mengalami pertumbuhan, sementara rasio kemandirian masih berada pada level yang rendah dikarenakan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah berhasil meningkatkan transparansi dan tanggung jawab laporan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu disarankan untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengoptimalkan pajak dan retribusi yang ada. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperbesar alokasi belanja modal demi mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Penelitian di masa mendatang diharapkan memanfaatkan metode analisis yang lebih beragam dan rentang waktu penelitian yang lebih panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, R. (2022). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(2), 45–56.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2023*.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. BPFE.
- Darise, N. (2020). *Pengelolaan keuangan daerah*. Indeks.
- Halim, A. (2020). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2021). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Haryanto. (2020). *Akuntansi sektor publik*. UNDIP Press.
- Kasmir. (2021). *Analisis laporan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022*.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2021). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Nordian, D. (2020). *Akuntansi pemerintahan*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Prasetyo, D. (2023). Pengaruh penerapan SAP terhadap akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 22–34.

- Ritonga, I. T. (2021). *Akuntansi pemerintah daerah*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Analisis laporan keuangan*. Pustaka Baru Press.
- Wibowo. (2021). *Manajemen kinerja*. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2020). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi*. Insan Cendekia.
- Yuliani, S. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi keuangan daerah pada pemerintah kota. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(3), 78–89.
- Yusuf, M. (2020). *Pengantar akuntansi pemerintahan*. Prenadamedia Group.